

**MODEL PELATIHAN BERSAMA UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR
PADA PEMERINTAH PROVINSI MITRA PRAJA UTAMA**

***JOINT TRAINING MODEL FOR ENHANCING COMPETENCY OF APPARATUS IN
PROVINCE GOVERNMENT OF MITRA PRAJA UTAMA***

(disubmit 10 Agustus 2018, direvisi 20 Oktober 2018, diterima 01 Desember 2018)

Hari Soesanto

BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Corresponding Author: harisemesta@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian atau kajian mengenai pelatihan bagi para aparatur sipil negara sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang fokus pada pelatihan bagi aparatur yang bertugas pada pemerintah daerah Mitra Praja Utama masih sangat langka. Kajian ini menyajikan skema atau model alternatif peningkatan kompetensi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kerjasama antar daerah melalui pelatihan bersama. Ruang lingkup pemerintah daerah yang menjadi kajian adalah pemerintah daerah yang tergabung dalam forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU merupakan forum kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Model pelatihan bersama yang disajikan pada kajian ini merupakan suatu alternatif metode yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga diklat pemerintah, khususnya pada lembaga diklat pemerintah yang tergabung dalam Mitra Praja Utama dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah untuk berbagai urusan pemerintahan daerah terutama dari aspek kompetensi aparatur.

Kata kunci: pelatihan, mitra praja utama, kompetensi, aparatur sipil negara

ABSTRACT

Research or studies on training for the state civil apparatus have been carried out a lot, but research that focuses on training for officers serving in the Mitra Praja Utama regional government is still very rare. This study presents an alternative model for enhancing the competence of civil state apparatus to increase cooperation among regions through joint training. The scope of local government to be studied is the local government who are members of the forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU is a forum of cooperation and coordination among local governments in Indonesia consisting of 10 Provinces of West Java Province, DKI Jakarta Province, Central Java Province, Special Province of Yogyakarta, East Java Province, Bali Province, Lampung Province, West Nusa Tenggara Province, Banten Province and East Nusa Tenggara Province. The joint training model presented in this study is an alternative method that can be ascertained by special government training institutions in government training institutions incorporated in Mitra Praja Utama in order to increase inter-regional cooperation for various local government affairs.

Keywords: training, mitra praja utama, competence, civil state apparatus

PENDAHULUAN

Di era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi daerahnya masing-masing berlomba-lomba dengan pemerintah daerah lainnya dalam rangka mencapai visi dan misi daerahnya dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain adalah mencakup urusan-urusan pemerintahan yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik yang sifatnya urusan wajib maupun urusan pilihan. Misalnya saja urusan pemerintahan yang sifatnya wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial.

Urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut perlu disukseskan oleh pemerintah daerah melalui pola kerjasama antar daerah. Salah satu pola kerjasama antara daerah yang ada di Indonesia saat ini yaitu Forum

Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU).

MPU merupakan forum kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah yang terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk memperlancar forum tersebut dibentuk Sekretariat Bersama (Sekber) MPU yang saat ini berkedudukan di DKI Jakarta.

Adapun acuan kerjasama program prioritas Forum Kerjasama Daerah MPU tahun 2016 – 2020 yaitu berdasarkan Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah MPU Nomor: 64/SK/MPU/2015. Ada 4(empat) program prioritas MPU tahun 2016 – 2020 yaitu 1) Pemberdayaan UKM/IKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); 2) Pengembangan Industri Pariwisata 10 Provinsi MPU; 3) Penguatan Pusat Logistik Pangan Daerah dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional; 4) Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Masalah Sosial Berdampak Nasional. Berdasarkan program prioritas tersebut, terdapat sub program yang terdapat pada semua program prioritas yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

Terkait dengan hal tersebut, pola hubungan dan jaringan kerjasama aparatur antar daerah lingkup MPU tersebut secara komprehensif sangat diperlukan, walaupun secara teknis pada SKPD anggota MPU sudah melakukan pengembangan kompetensi masing-masing aparturnya secara masing-masing atau parsial. Sedangkan pengembangan kompetensi yang melibatkan partisipasi keseluruhan anggota MPU untuk berbagai urusan pemerintahan belum terlihat. Oleh karenanya perlu pelibatan atau keterlibatan langsung peran lembaga diklat pemerintah provinsi atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah secara langsung terkait dengan pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan progam atau urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Forum MPU yang sudah dibentuk perlu dikuatkan dengan program dan kegiatan yang melibatkan lintas anggota MPU secara konkrit, jangan sampai efektivitasnya rendah sebagaimana kajian yang dilakukan oleh (Tim Kajian LAN, 2012) mengenai kerjasama antar provinsi di Kalimantan yaitu adanya forum koordinasi dan konsultasi (FRKP2K) dimana efektivitas hubungan kerja tersebut masih rendah, karena forum tersebut hanya sebatas forum pra musrenbang regional untuk menginventarisasi persoalan dan usulan yang akan dibahas di forum

musrenbang regional maupun dibawa ke kementerian terkait, belum sampai kepada rencana aksi berupa program dan kegiatan yang konkrit.

Pelaksana utama kerjasama antar daerah adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki peran yaitu sebagai perencana, pelaksana dan pengawas untuk mencapai pembangunan daerah dan nasional. Untuk proses percepatan pencapaian tujuan pembangunan pada provinsi lingkup MPU tersebut, kapasitas ASN nya pun harus sesuai dengan kompetensi masing-masing urusan yang menjadi domain kerjasama antar daerah. Keterlibatan lembaga diklat daerah secara teknis diperlukan dalam rangka mendisain dan mengoordinasikan pelatihan-pelatihan dan atau skema pengembangan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk tiap-tiap urusan pemerintahan yang menjadi fokus kerjasama.

Pengetahuan termasuk keahlian ASN yang tergabung pada MPU sangat bervariasi, kompleksitas pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk saling melengkapi pengetahuan ASN sehingga kapasitasnya bertambah. Pendekatan ini merujuk pada pendekatan *knowledge management* atau manajemen pengetahuan.

Manajemen pengetahuan adalah isu strategis yang biasanya digunakan untuk perencanaan strategis pengembangan organisasi untuk mencapai daya saing organisasi dan mempertahankan pengetahuan organisasi. Hal ini juga menjadi tren di institusi pemerintah untuk menerapkan manajemen pengetahuan sesuai dengan peraturan. Rotasi karyawan internal, mutasi promosi dan program penawaran terbuka antar instansi pemerintah merupakan bagian dari kehilangan pengetahuan ini (Sensuse, Wibowo, & Cahyaningsih, 2016). Tujuan utama kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan adalah memfasilitasi transfer pengetahuan ilmiah dan sosial yang efektif, yang dipegang oleh pemangku kepentingan, kepada pemerintah (Riege & Lindsay, 2006).

Manajemen pengetahuan atau *knowledge management* erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Dalam konteks pemerintah daerah, kompetensi yang berkorelasi dengan manajemen pengetahuan yaitu pada aktor ASN.

Penelitian-penelitian mengenai pelatihan bagi para aparatur sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh (Sartika & Kusumaningrum, 2017), (Soesanto, 2017), (Suryanto, 2018), (Hidayat & Sa'ud Syaefudin, 2015) akan tetapi penelitian yang fokus pada skema

pelatihan aparatur pada pemerintah daerah yang tergabung pada forum Mitra Praja Utama (MPU) masih sangat langka. Oleh karena itu pada penelitian ini difokuskan pada skema atau model pelatihan untuk para aparatur sipil negara yang bertugas pada pemerintah daerah yang tergabung dalam forum MPU.

METODE PENELITIAN

Penyusunan kajian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji berbagai karya tulis ilmiah para peneliti terdahulu terutama kajian terhadap fenomena aktual terutama dalam berbagai perspektif berdasarkan teori-teori yang relevan dan inisiasi konsepsi/gagasan serta dikombinasikan dengan studi kasus, yaitu kerjasama antara daerah lingkup forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama. Data diperoleh berdasarkan dokumentasi regulasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Praja Utama melalui penelusuran konten di portal/website Mitra Praja Utama kurun waktu Januari – Maret 2018. Berdasarkan data serta tinjauan literatur, dilakukan perumusan model pelatihan bersama untuk aparatur sipil negara (ASN) pemerintah provinsi yang tergabung dalam forum kerjasama antar daerah Mitra Praja Utama (MPU melalui pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Antar Daerah

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini, paradigma kerjasama antar daerah saat ini bukan hanya semata-mata kerjasama biasa akan tetapi sudah menjadi suatu kolaborasi. Pemerintah daerah harus pro aktif melakukan intensifikasi jejaring kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya untuk mencapai visi dan misi daerahnya.

Kerjasama antar daerah merupakan aksi bersama (*collective action*) yang terjadi dalam proses unik. Keunikan kerjasama antar daerah ini terlihat dari antara lain, pola hubungan yang terjalin dilandasi oleh relasi horisontal, bukan hirarkhial. Konsekuensi dari pola hubungan ini akan berimplikasi pada pendekatan yang semestinya dipahami bersama oleh aktor yang terlibat (Warsono, 2009).

Pemahaman bersama antar pemerintah daerah memang menjadi landasan utama untuk menjalin hubungan kerjasama. Keban (2009) menyatakan alasan pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah sebagai berikut:

1) Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk *kekuatan yang lebih besar*. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat *disinergikan* untuk menghadapi

ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

2) Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai *kemajuan yang lebih tinggi*. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.

3) Pihak-pihak yang bekerjasama *dapat lebih berdaya*. Dengan kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.

4) Pihak-pihak yang bekerjasama dapat *memperkecil atau mencegah konflik*. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah

terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.

- 5) Masing-masing pihak lebih *merasakan keadilan*. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
- 6) Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara *keberlanjutan* penanganan bidang-bidang yang dikerjakasikan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
- 7) Kerjasama ini dapat menghilangkan *ego daerah*. Melalui kerjasama tersebut, kecenderungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

Bidang kerjasama antar daerah merupakan salah satu faktor yang harus dideskripsikan dengan jelas dalam kesepakatan kerjasama. Sebaiknya dikurangi sekat-sekat yang malah parsial antar bidang atau urusan pemerintahan, sebagaimana Warsono (2009) menyatakan

sebagian besar kerjasama di Indonesia terkotak-kotak dalam kerjasama ekonomi atau pelayanan publik. Mengingat kebutuhan kerjasama sudah merambah pada pelayanan publik dan ekonomi, ke depan sebaiknya cakupan kerjasama tidak sebatas pada salah satu bidang seperti yang selama ini terjadi, tetapi mencakup 2 bidang utama, yakni kerjasama ekonomi dan pelayanan publik.

Mitra Praja Utama

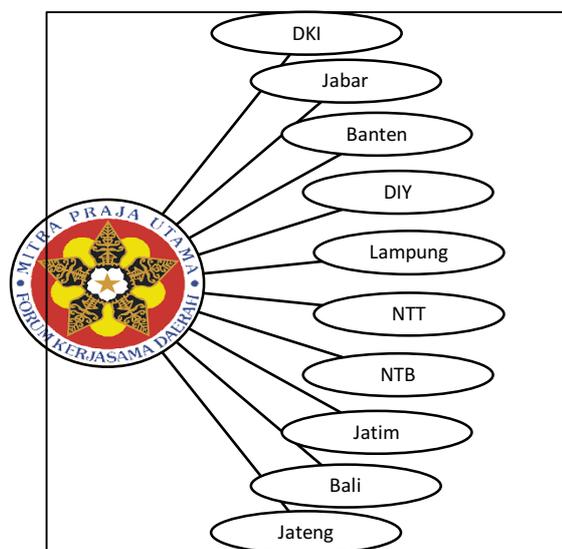
Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) dibentuk pada Tahun 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum MPU ini merupakan pengembangan dari Forum Sad Praja Utama (SPU) dalam mengantisipasi perkembangan jumlah anggota yang terus bertambah. Forum SPU ini diawali dengan acara silaturahmi dan olahraga antar anggota KORPRI DKI Jakarta dan Jawa Barat, kemudian berkembang ke penanganan masalah pemerintahan terutama diperbatasan. Tindaklanjut pertemuan tersebut dikukuhkan dengan membentuk suatu kerjasama dengan nama Dwi Praja di Bogor pada tanggal 15 Juli 1988, yang menjadi tekanan (fokus) program adalah bidang kependudukan (urbanisasi), ketenagakerjaan, transportasi dan perekonomian.

Keberhasilan Forum Kerjasama Dwi Praja dalam mengatasi permasalahan antara

dua daerah kemudian ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah melalui penandatanganan Keputusan Bersama Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah, Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat, dan Gubernur KDKI Jakarta di Semarang pada tanggal 26 Juni 1990 dan forum ini dirubah namanya menjadi Tri Praja. Forum ini kemudian berkembang pesat menjadi jalinan kerjasama 6 (enam) Provinsi se Jawa dan Bali dengan nama Sad Praja Utama yang dikukuhkan dan ditandatangani dalam Keputusan Bersama Gubernur pada tanggal 3 November 1991 di Yogyakarta. Sad Praja Utama berarti kerjasama Enam Pemerintahan Daerah Tk. I se Jawa dan Bali. SAD berarti Enam, PRAJA berarti Pemerintahan, sedangkan Utama berarti Tk. I (Provinsi). Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan Forum Sad Praja Utama tidak hanya yang berkaitan dengan penanganan permasalahan di daerah yang saling berbatasan, namun telah berkembang dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan daerah seperti bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberhasilan Forum Kerjasama Sad Praja Utama dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama melalui kerjasama daerah, menarik minat Provinsi Lampung untuk ikut bergabung menjadi anggota Forum Sad Praja Utama

(SPU). Provinsi Lampung secara resmi diterima menjadi anggota pada tanggal 21 September 2000 di Yogyakarta.

Dengan masuknya Provinsi Lampung menjadi anggota Forum SPU membawa konsekuensi kepada nama Forum Sad Praja Utama yang tidak lagi beranggotakan 6 (enam) Provinsi, melainkan menjadi 7 (tujuh) Provinsi. Itulah sebabnya nama Forum Sad Praja Utama (yang berarti 6 daerah provinsi) berubah menjadi Forum Mitra Praja Utama (MPU). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keinginan provinsi lainnya untuk bergabung sebagai anggota. Perkembangan keanggotaan selanjutnya setelah itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat bergabung pada Tahun 2001 ditetapkan di Denpasar Bali, Provinsi Banten bergabung pada Tahun 2002 ditetapkan di Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 ditetapkan di Bandung Jawa Barat.



Gambar 1. Provinsi Anggota MPU

Program prioritas MPU 2016-2020 yaitu:

- 1) Pemberdayaan UKM/IKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- 2) Pengembangan industri pariwisata 10 Provinsi MPU melalui penguatan peran Indonesia Tourism Information Center;
- 3) Pembentukan pusat logistik pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan 10 Provinsi MPU
- 4) Koordinasi dan fasilitasi masalah sosial berdampak nasional.

Dalam tiap program prioritas tersebut terdapat aspek sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Salah satu sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan yaitu para aparatur sipil negara yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemerintah provinsi yang terlibat dalam kerjasama sesuai urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Jumlah PNS daerah yang tersebar pada Provinsi MPU sekitar 1,6 juta orang sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 terlihat begitu besarnya potensi PNS yang tergabung dalam forum MPU. Kondisi saat ini belum terdapat pelatihan secara bersama-sama yang intensif yang dapat menggabungkan semua PNS (sesuai dengan rumpun urusan pemerintahan) yang terdapat pada MPU dalam satu kegiatan khusus, padahal

sebagaimana konsep manajemen pengetahuan, dipastikan pasti banyak keahlian-keahlian yang dimiliki oleh PNS yang tersebar pada 10 (sepuluh) pemda tersebut.

Tabel 1. Jumlah PNS Daerah pada Provinsi Mitra Praja Utama (MPU)

No	Provinsi	Jumlah
1	Jabar	333.952
2	DKI Jakarta	72.767
3	Jateng	356.645
4	DIY	53.743
5	Jatim	389.663
6	Bali	72.096
7	Lampung	105.965
8	NTB	79.327
9	Banten	77.040
10	NTT	111.198
Jumlah		1.652.396

Sumber: www.bkn.go.id (data per desember 2016; diolah)

Model Pelatihan Bersama

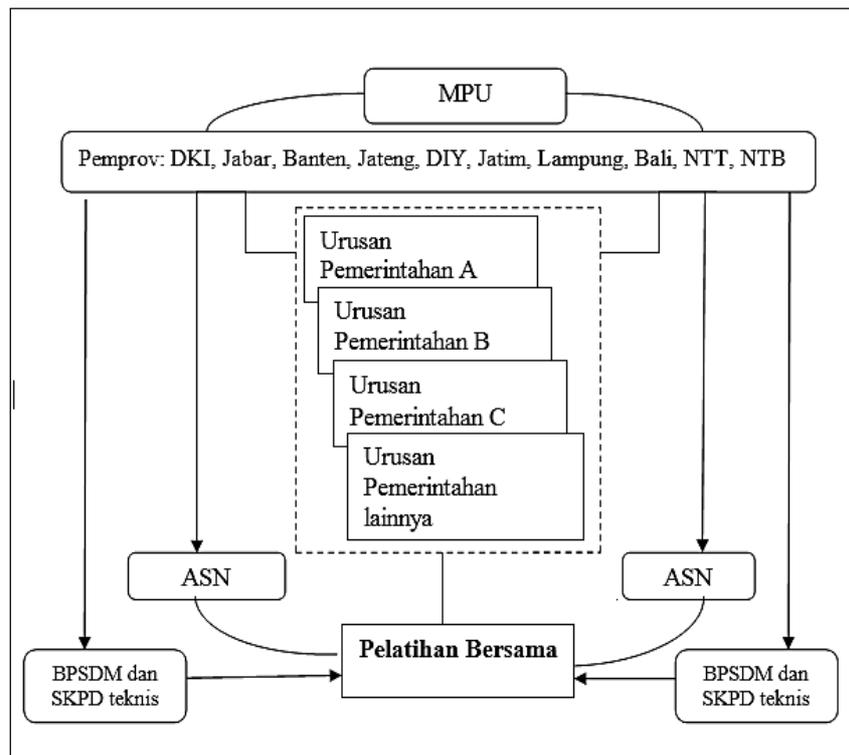
Lembaga diklat pada Pemerintah Provinsi atau yang saat ini dikenal sebagai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dapat menjadi aktor pemacu akselerasi peningkatan kerjasama antar daerah pada Forum MPU untuk berbagai macam urusan pemerintahan daerah. Sobandi dan Suparman (2010) menyatakan lembaga diklat sebagai *a center of excellence* yaitu sebagai pusat keunggulan yang tercermin dari beberapa dimensi yaitu 1) program diklat yang berkualitas tinggi; 2) widyaiswara/fasilitator diklat yang profesional; 3) tenaga penyelenggara diklat yang profesional; 4) proses manajemen lembaga diklat yang transparan dan

akuntabel; 5) sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap. Senada dengan pendapat Sobandi dan Suparman (2010) tersebut, memang diperlukan eksistensi lembaga diklat (dalam hal ini BPSDM Daerah lingkup) untuk mendisain program diklat yang berkualitas tinggi yang berdampak terhadap kinerja Pemerintah Provinsi.

Disain program pelatihan yang dapat menuju pada arah kolaborasi antar anggota MPU diyakini dapat mempercepat pencapaian tujuan anggota MPU. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh (An, Deng, Chao, & Bai, 2014) yaitu Inovasi kolaboratif adalah pendekatan transdisipliner untuk mengembangkan sinergi menyeluruh untuk meningkatkan

daya saing organisasi melalui interaksi yang holistik, kompetitif dan saling melengkapi antara dan di antara peserta inovasi dalam lingkungan tertentu.

Merujuk pada program prioritas kerja MPU 2016-2020 diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mewujudkannya. Dari aspek kompetensi aparatur, basis kompetensi yang digunakan pada perancangan model pelatihan bersama ini yaitu kombinasi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio-kultural dan kompetensi pemerintahan. Oleh karena itu pada kajian ini dirumuskan model pelatihan bersama bagi aparatur sipil negara yang bertugas pada pemerintah provinsi lingkup MPU sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Pelatihan Bersama ASN lingkup MPU

Berdasarkan Gambar 2 tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) Pemerintah Provinsi melakukan kerjasama melalui payung MPU. selanjutnya secara operasional, lembaga diklat Pemerintah Provinsi tersebut (BPSDM Provinsi) melakukan perencanaan disain pelatihan yang dibutuhkan oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan. Disain yang dirancang oleh masing-masing BPSDM Provinsi dikomunikasikan melalui Sekretariat Bersama (Sekber) MPU untuk dilakukan sinkronisasi merujuk pada program prioritas MPU. Tahap selanjutnya adalah proses pendaftaran para ASN yang akan diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan bersama tersebut. Jenis pelatihan yang merujuk pada urusan pemerintahan daerah ini dikategorikan pada pelatihan teknis.

Jenis pelatihan bersama lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial ASN yaitu Diklat Kepemimpinan. Melalui model pelatihan bersama, maka Diklat Kepemimpinan pada anggota MPU juga sangat berpotensi untuk dilakukan secara partisipatif proporsional pada satu event bersama. Misalnya, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dilakukan di Provinsi Banten, dimana pada tiap angkatannya (30 orang) terdiri dari komposisi peserta dari Provinsi Banten, DKI

Jakarta, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, DIY, NTT dan NTB.

Hal yang sejenis juga dilakukan untuk pelatihan bersama untuk meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional. Misalnya saja, pelatihan bersama urusan pangan maka pelatihan tersebut disusun bersama oleh pemerintah provinsi seluruh anggota MPU untuk selanjutnya diikuti oleh para ASN anggota MPU yang substansinya diarahkan untuk meningkatkan volume kerjasama pangan lintas provinsi MPU. Disain kurikulum dikoordinasikan oleh BPSDM Provinsi anggota MPU berkolaborasi dengan SKPD yang menangani urusan pangan. Sebagai ilustrasi, jenis kompetensi dan contoh pelatihan yang dapat dilakukan melalui model pelatihan bersama MPU yaitu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Kompetensi dan Contoh Pelatihan melalui Model Pelatihan Bersama MPU

No	Jenis Kompetensi	Contoh Pelatihan
1	Teknis-Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah; • Diklat Manajemen Penanganan Bencana • Diklat Pengawasan Pangan Terpadu • Diklat Analisis Ketahanan Pangan
2	Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Kepemimpinan Tingkat II • Diklat Kepemimpinan Tingkat III • Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
3	Sosio Kultural	Diklat Bina Damai
4	Pemerintahan	Diklat Pemerintahan Dalam Negeri

Contoh bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis-fungsional para ASN anggota MPU, misalnya Diklat Analisis Ketahanan Pangan. Diklat ini diperuntukkan terutama untuk para analis ketahanan pangan yang pada umumnya bertugas pada SKPD yang menangani urusan pangan, semisal Badan Ketahanan Pangan atau nomenklatur lainnya. Ketika para ASN lintas anggota MPU mengikuti diklat tersebut diharapkan ruang lingkup ketahanan pangan yang dibahas bukan hanya pada lingkup provinsinya saja akan tetapi lintas provinsi. Misalnya, untuk urusan pangan di Provinsi DKI Jakarta yang notabene-nya tergantung pada Provinsi produsen pangan tentu menjadi sangat vital ketika dilakukan analisa jaringan rantai pasok pangan dari dan ke Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan bagi Provinsi produsen pangan, maka menjadi kebutuhan bagi daerah tersebut untuk memasarkan produk pangannya kepada daerah lain yang marketnya besar, semisal DKI Jakarta. Jadi dampak pelatihan bersama pada contoh urusan pangan tersebut bukan hanya untuk ajang bertukar pengalaman, keahlian, pengetahuan mengenai analisis ketahanan pangan akan tetapi lebih makro lagi yaitu sampai pada keterhubungan jejaring rantai pasok (*supply chain*) pangan.

Contoh lain bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi manajerial yaitu

Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV. Tujuan utama diklat tersebut yaitu untuk membentuk pemimpin perubahan dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah berkinerja tinggi. Ketika suatu pemerintah provinsi melaksanakan diklat kepemimpinan dengan komposisi peserta hanya berasal dari pejabat administrasi (eselon III dan IV) lingkup daerah saja, maka situasi dan kondisi lingkungan daerah (Pemprov) lainnya kemungkinan besar tidak menjadi perhatian. Ketika diklat kepemimpinan dilakukan secara bersama yaitu dengan melibatkan partisipasi dari para peserta yang mewakili anggota MPU maka situasi kelas atau pembelajaran pada diklat tersebut menjadi lebih berwarna dan tentunya akan sangat menambah pertukaran pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pelatihan-pelatihan yang dapat diselenggarakan dengan mekanisme Model Pelatihan Bersama MPU seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1, dapat dikembangkan sesuai kebutuhan para anggota MPU dan kesepakatan bersama anggota MPU.

Berdasarkan laporan PLOD dan APEKSI (2006), terdapat beberapa perwujudan dari intergovernmental networks pada tingkatan daerah. Yang pertama adalah *information networks*, dimana daerah dapat membuat sebuah forum yang berfungsi sebagai pertukaran kebijakan dan program, teknologi dan

solusi potensial atas masalah-masalah bersama. Yang kedua adalah *developmental networks*, dimana dalam jenis ini engagement dari masing-masing daerah lebih tinggi karena interaksi antar daerah tidak hanya dalam pertukaran informasi, tapi juga dikombinasikan dengan pendidikan dan pelayanan yang secara langsung meningkatkan kapasitas informasi daerah untuk melaksanakan solusi atas masing-masing persoalannya. Yang ketiga adalah *outreach networks*, dimana *network* antara daerah lebih solid dengan adanya program strategi untuk masing-masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan di lain daerah. Yang keempat adalah *action networks*, yang merupakan bentuk *intergovernmental networks* yang paling solid, dimana daerah-daerah secara bersama-sama membuat serangkaian program aksi bersama yang dijalankan oleh masing-masing daerah sesuai dengan proporsi dan kemampuannya masing-masing.

Model pelatihan bersama yang dirancang pada kajian ini adalah termasuk pada jenis *action networks*, dimana Pemerintah Provinsi lingkup MPU melalui BPSDM-BPSDMnya secara bersama-sama membuat program aksi bersama yaitu pelatihan bersama sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota MPU. Agar gagasan menjadi suatu kenyataan, maka model pelatihan bersama yang dirancang

oleh lembaga diklat pemerintah provinsi anggota MPU perlu dbuatkan rencana aksinya setidaknya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. pada tahun pertama, melalui pertemuan yang dikondisikan oleh Sekber MPU maka diselenggarakan pertemuan teknis antara lembaga diklat pemerintah provinsi (BPSDM) dari 10 anggota MPU. Output dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan perencanaan disain pelatihan bersama untuk pengembangan kompetensi yang dipilih. perencanaan tersebut termasuk rencana anggaran biaya serta potensi inventarisir data potensial calon peserta pelatihan. selanjutnya pada tahun kedua sudah diinisiasi beberapa jenis pelatihan dengan tuan rumah yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan. pada tahun ketiga, diperbanyak jenis-jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh beberapa tuan rumah BPSDM. sedangkan di tahun keempat, kelanjutan pelatihan dari tahun ketiga. Dan pada tahun kelima dilakukan pelatihan yang direncanakan serta evaluasi dan perencanaan untuk rencana aksi jangka panjang berikutnya.

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan kerjasama antar daerah lingkup MPU diperlukan kompetensi aparatur yang mumpuni. Pengembangan kompetensi aparatur yang selama ini secara parsial pada masing-masing daerah perlu terobosan strategi

yang dapat mengakomodasi program prioritas pemerintah provinsi MPU tahun 2016-2020. Alternatif model pelatihan bagi para aparatur pada pemerintah provinsi lingkup MPU yaitu melalui model pelatihan bersama. Elemen utama model ini yaitu lembaga diklat provinsi atau BPSDM Provinsi yang berperan mengkoordinasikan dengan SKPD teknis.

Pada tahap awal direkomendasikan dapat dilakukan ujicoba pelatihan bersama untuk 2 (dua) provinsi, selanjutnya ditingkatkan partisipasi sampai dengan seluruh anggota MPU yang jumlahnya 10 (sepuluh) provinsi atau dapat pula dilakukan secara langsung untuk semua anggota MPU. Dengan demikian target pencapaian program prioritas MPU yang didukung dari aspek aparatur diharapkan dapat lebih cepat terwujud.

DAFTAR PUSTKA

- An, X., Deng, H., Chao, L., & Bai, W. (2014). Knowledge management in supporting collaborative innovation community capacity building. *Journal of Knowledge Management*, 18 (3), pp. 574–590. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2013-0413>
- Hidayat, A. I., & Sa'ud Syaefudin, U. (2015). Model Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Widyaiswara Muda. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 22(2), pp. 23–38.
- Riege, A., & Lindsay, N. (2006). Knowledge management in the public sector: stakeholder partnerships in the public policy development. *Journal of Knowledge Management*, 10 (3), pp. 24–39. <https://doi.org/10.1108/13673270610670830>
- Sartika, D., & Kusumaningrum, M. (2017). Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 13 (2), pp. 131–150. <https://doi.org/10.24258/jba.v13i2.310>
- Sensuse, D. I., Wibowo, W. C., & Cahyaningsih, E. (2016). Indonesian Government Knowledge Management Model: *Information Resources Management Journal*, 29 (1), pp. 91–108. <https://doi.org/10.4018/irmj.2016010106>
- Soesanto, H. (2017). Development of Innovation Project as the Result of Leadership Training Through the Innovation Actor Collaboration Model in the Region. *Jurnal Bina Praja*, 9 (2), pp. 335–343. <https://doi.org/10.21787/jbp.09>
- Suryanto, A. (2018). Strategi Peningkatan Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan: Telaah Teoritis dan Empiris. *Jurnal Borneo Administrator*, 14 (1), pp. 69–86.
- Tim Kajian LAN. (2012). Kerjasama Antar Provinsi untuk Pembangunan Regional Kalimantan yang Terintegrasi. *Jurnal Borneo Administrator*, 8 (1), pp. 31–49.
- Keban, Yeremias, T. (2009). Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan

Prinsip.
https://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/03yeremiastkeban__20091014131110__2258__0.pdf

PLOD UGM dan APEKSI. (2006). Model Kerjasama Antar Daerah. Yogyakarta. Retrieved from <http://bayudardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/02-Model-KERJASAMA-ANTAR-DAERAH-S2-PLOD-UGM.pdf>

Sobandi, Baban. dan Suparman, Rahmat (2010). Membangun Kepemimpinan Visioner untuk Mewujudkan Lembaga Diklat sebagai a Center of

Excellence. *Jurnal Diklat Aparatur*. 6 (1), pp. 1-12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Warsono, Hardi. (2009). Networking dalam Intergovernmental Management. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. 6 (1), 78-91. Retrieved from: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/424/300>